





Lebih jauh, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan.

Begitu pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat di kampung, membuat peneliti tertarik dan ingin mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung, kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung Kamangi Kabupaten Merauke.

#### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui informan kunci yang ditentukan secara bertujuan (*purposive*). Ada pun yang ditetapkan sebagai informan kunci adalah Kepala Kampung dan aparat Pemerintahan Kampung, pengurus Program Pembangunan Kampung serta beberapa tokoh masyarakat yang ditentukan secara *snow ball*. Disamping itu, studi dokumentasi dan observasi juga digunakan untuk menjangkau data yang

relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga aktifitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Drawing and Verifying Conclusions* (Miles, Huberman, and Saldana : 2014).

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Kamangi Distrik Tanah Miring. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena Kampung Kamangi merupakan Kampung yang baru di mekarkan pada akhir tahun 2015 sehingga masih perlu perhatian, bagaimana dan seperti apa kondisi warga dan pembangunannya. Serta kehidupan warga yang masih sangat tergantung dengan bantuan-bantuan pemerintah daerah dan pekerjaan warganya yang bersifat tradisional seperti mencari hasil hutan, berburu dan mencari ikan (tradisi meramu).

#### Konsep Partisipasi Masyarakat

Sumaryadi, (2010: 46) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan Cohen dan Uphoff dalam Astuti (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat

jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Conyer dalam Soetomo (2008), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu: 1) Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 2) Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan. 3) Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi. 4) Perencanaan melalui pemerintah lokal. 5) Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*).

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan/keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok

dalam suatu kegiatan. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, dikatakan oleh Mikkelsen (2011:56) bahwa dibutuhkan pendekatan yang mensinergikan potensi masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong peran serta aktif masyarakat. Lebih lanjut Mikkelsen mengartikan partisipasi, antara lain : “(a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (b) partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyekproyek pembangunan. (c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. (d) partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. (e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. (f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.”

Secara umum partisipasi dapat dilihat dari bentuk keikutertaan masyarakat yang dapat dilihat dari bentuk nyata maupun tidak nyata. Sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat/kelompok terdapat beberapa wujud dari partisipasi. Seperti yang diungkapkan oleh Isbandi (2007) bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan masyarakat jugalah permasalahan yang mereka hadapi. Namun kenyataan yang masih terlihat bahwa di setiap program pembangunan, partisipasi masyarakat belum terlihat secara keseluruhan.

Luigi Bobbio (2018) mengartikan bahwa partisipasi adalah di mana warga negara terlibat di dalam proses desain suatu kebijakan.

Partisipasi publik dengan demikian merupakan alat prosedural yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk memasukkan aktor baru (yaitu warga negara) dalam jaringan kebijakan dan mempercayakan beberapa kepada mereka.

Slamet (2003) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu: (a) Adanya kesempatan yang di berikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi. (b) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi (c) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Selain itu, ada tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat kampung agar ikut serta dalam pembangunan: (1) Learning proces (learning by doing); proses kegiatan dengan melakukan aktifitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat. (2) Institusional development; melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karna institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tamping dan daya dukung sosial. (3) Participatory; cara ini merupakan suatu





pegang bendahara tanda tangan saja, dana-dana kepala kampung yang atur.

Artinya fungsi kesetaraan kewenangan tidak ada untuk bendahara kampung, kepercayaan terhadap bendahara kampung belum ada, seharusnya masalah perbendaharaan sepenuhnya tanggungjawab jabatan, sehingga jelas dominasi terjadi dalam bidang keuangan. Dalam pengambilan keputusan yang tidak melibatkan anggotanya juga terjadi dalam lembaga kampung khususnya Bamuskam demikian penjelasan hasil diskusi kelompok seperti pernyataan tokoh agama sekaligus tokoh pendidikan yang ditujukan kepada ketua Bamuskam dalam menjawab pertanyaan moderator diskusi, demikian penjelasan tokoh agama.

Hal ini menjelaskan bagaimana antara sesama anggota Bamuskam belum memiliki kesetaraan kewenangan yang sama dalam mengambil suatu keputusan. Prosedur usulan tidak selalu tepat adanya dominasi keputusan sepihak oleh Bamuskam menjadi masalah utama partisipasi pada prinsip kesetaraan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan Kampung.

### ***Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility)***

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Indikator ini pun juga belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kampung Kamangi. Hal ini dapat kita lihat dari Keterangan singkat Informan selaku Kaur Kesra Kampung Kamangi yang belum mendapat kesempatan penuh atas rekan-rekan aparat lainnya bahkan pemerintah kampung dalam menyusun programnya, sehingga program bidang Kesejahteraan rakyat tidak pernah mendapat tanggapan bahkan masuk dalam program tahunan kampung sejak 2 tahun berdirinya kampung Kamangi. Ini menunjukkan salah satu prinsip partisipasi dalam fungsi kesetaraan tanggungjawab belum terlaksana dengan baik.

Kemampuan sumber daya manusia merupakan kendala utama dalam berpartisipasi untuk pembangunan kampung, apakah itu melalui rencana atau program yang sudah di konsep. Pernyataan tersebut jelas tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip Partisipasi kesetaraan Masyarakat dalam pembangunan Kampung Kamangi. Intinya bahwa

partisipasi itu dimana partisipasi masyarakat kelompok, masyarakat pendidikan, masyarakat rohani sampai sekarang kan pemerintahan kampung, bagaimana peranan partisipasi pemerintah kampung mengayomi masyarakat ketiga kelompok ini untuk menuju kepada masyarakat yang modern masyarakat yang bisa melindungi diri sendiri mendukung pemerintahan disegala sektor pembangunan, jadi intinya bahwa partisipasi mendapat satu bentuk kebersamaan untuk menuju masyarakat yang bisa mandiri, bertanggung jawab dimana kita berkelompok.

### ***Pemberdayaan (Empowerment)***

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Pemberdayaan di Kampung Kamangi sebenarnya telah dicanangkan oleh pihak bamuskam yaitu untuk mengelola 20 hektar lebih lahan pertanian yang tidak beroperasi di Kampung Kamangi.

Upaya ketua Bamuskam untuk mengelola lahan tidur seluas 21 hektar di lingkungan Kamangi merupakan upaya pemberdayaan untuk mensejahterakan

masyarakat agar sumber ekonomi masyarakat tidak tergantung pada alam namun sejauh ini belum mendapat dukungan dari pemerintah kampung.

Keinginan ketua Gapoktan agar pemerintah kampung mendukung ekonomi pertanian masyarakat kampung Kamangi dengan memberikan suport berupa dana kelola pertanian namun harapan ketua Gapoktan tidak terwujud sementara dana pemberdayaan ada. Pemerintah kampung mendapat protes dari Satgas dana desa dari Pusat. Akibat pembangunan rumah yang menggunakan ADD, dan tidak mempergunakan untuk kegiatan padat karya seperti pembuatan jalan dan gorong-gorong, belum berpihak pada kepentingan orang banyak. Menurut kepala seksi pelayanan bahwa pemberdayaan merupakan bagian dari tugas bidang 3 yaitu pemberdayaan Kampung.

Menurut kepala seksi pelayanan bahwa dana pemberdayaan sebagian di lempar ke pembangunan perumahan kamasyarakatan, ini merupakan kebijakan kepala kampung yang mempertimbangkan keinginan masyarakat yang meminta untuk pemenuhan perumahan agar lebih di utamakan demikian penjelasan sataf aparat kampung bidang pelayanan.

Harapan dan keinginan ketua Bamuskam yang fokus pada sektor pertanian pendidikan dan kerohanian kesehatan mengajak pemerintah kampung agar lebih memperhatikan kedepannya lebih memperdayakan sektor-sektor tersebut sehingga dapat berguna untuk masyarakat kampung.

### ***Kerjasama***

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. Akan tetapi, kemampuan aparatur kampung khususnya pelayanan masih sangat terbatas yang berkaitan dengan kemampuan SDM aparatur, namun upaya untuk mendapat pembinaan-pembinaan masih terus diupayakan dari pemerintah Kampung. Disisi lain pelayanan Administrasi terus memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan keterbatasan kemampuan SDM aparat. Salah satu hasil wawancara dengan sekretaris kampung dalam partisipasi pelayanan administrasi kampung.

Kemampuan sumber daya manusia masih menjadi kendala dan hambatan dalam pelayanan yang maksimal, namun sebagai sekretaris

kampung tetap memberikan pelayanan dengan baik, walaupun tenaga teknis ada mendapat bantuan dari kepala seksi pelayanan Berikut keterangan kepala seksi pelayanan.

Salah satu tugas pelayanan administrasi umum adalah pencatatan dan pendataan KK, KTP dan surat keterangan lain. Upaya pelayanan administrasi adalah bagian dari partisipasi pembangunan bidang pelayanan kampung. Peran pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan harus tetap berjalan dan memperhatikan kualitas pelayanan guna tercapainya masyarakat yang tertib administrasi dan sejahtera. kepala kampung mempekerjakan tenaga teknis sebagai tenaga pendamping kampung yang sekaligus memberikan pelatihan pengetahuan komputer Aparatur Kampung.

Pihak pemerintah kampung melakukan kontrak kerja kepada tenaga pendamping untuk membantu berpartisipasi dalam pelayanan kampung khususnya administrasi kantor. Tenaga pendamping kampung bertugas membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ), kampung yang seharusnya menjadi tanggungjawab Kaur keuangan kampung. Selain itu, tugas lain tenaga teknis seperti

yang disampaikan sekertaris kampung berikut keterangannya.

Prinsip partisipasi kerjasama merupakan dasar kekuatan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pandangan ketua RT 02/RW 01 bapak Kansius Ukurop tentang pelayanan administrasi. Pandangan masyarakat tentang administrasi masih kurang baik dalam pelayanan. Penataan administrasi terkesan begitu-begitu saja tidak ada perubahan selama kampung berdiri sendiri. Walaupun ada rasa kekhawatiran namun informan harus jujur mengakui tentang hal itu.

Memang harus di akui wujud dari partisipasi adalah sebuah kerjasama antara lembaga dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu bahkan inividu dengan individu. Yang menjadi masalah di Kampung Kamangi adalah tidak adanya kerjasama di dalam mengelola pemerintahan Kampung, baik dari sisi aparat kampung dengan kelompok masyarakat, ataupun dengan masyarakat itu sendiri. Bahkan perhatian pemerintah terhadap ekonomi pertanian tidak ada selama ini, pembangunan tanpa kerjasama tidak akan berjalan baik. Dukungan masyarakat dalam pembangunan akan merupakan unjuk tombak dari sebuah partisipasi aktif

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kendala-Kendala Partisipasi dalam Pembangunan Kampung Kamangi**

Beberapa kendala partisipasi yang ada dan dihadapi masyarakat Kampung Kamangi dalam pembangunan selama ini antara lain :

#### ***Tingkat Pendidikan***

Dikatakan bahwa kondisi Kampung Kamangi adalah kampung baru yang memang banyak kendala dalam merintis kampung tersebut, kendala yang ada selama ini seperti masalah tingkat pendidikan, pendidikan para pejabat Aparatur Kampung rata-rata Sekolah Dasar sehingga mengalami kesulitan dalam mengelolah anggaran Kampung, sebagai Bendahara tetap optimis dalam menjalankan fungsinya. Memang disadari fasilitas perkantoran masih terbatas namun pelayanan dan administrasi tetap harus dijalankan karna Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### ***Pekerjaan dan penghasilan***

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan. Sedangkan mayoritas masyarakat Kampung Kamangi adalah berkebun dan berburu yang mana penghasilan yang didapat tidak menentu. Hal ini membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu saat siang hari di hutan dan lading dari pada turut serta dalam pembangunan kampung.

### ***Kesadaran Masyarakat***

Masyarakat kampung memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, salah satunya adalah perbedaan generasi (usia) sangat menentukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program masyarakat. Kesadaran masyarakat di Kampung Kamangi masih banyak yang merasa mencari kebutuhan untuk makan sehari-hari di hutan dan di ladang lebih penting dari pada turut serta dalam pembangunan kampung. Salah satunya adalah sulitnya mengumpulkan

masyarakat untuk melakukan musyawarah kampung sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Padahal di ruang tersebutlah masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

### ***Tidak Adanya Akses***

Kegiatan pemerintahan di Kampung Kamangi saat ini tidak kerjasama yang baik antara sesama RT, RW Bamuskam bahkan pemerintah Kampung dan aparatnya, pernyataan itu dipertegas ketika kegiatan diskusi kelompok bahwa kerjasama dan dukungan dari pemerintah tidak ada sama sekali, harapan ketua RT 002 tersebut kiranya ada kerjasama yang baik dalam membangun Kampung baik secara fisik maupun pikiran dan saran, harus ada duduk bersama antara sesama RT dengan pemerintah kampung membahas rencana pembangunan kedepan. Karna informasi dan masukan yang bersifat mufakat akan sangat berguna dalam partisipasi masyarakat untuk membangun Kampung, sesuai hasil musyawarah tersebut diharapkan memunculkan ide dan gagasan baru yang cemerlang untuk masyarakat banyak sehingga tidak terkesan individual atau kepentingan oknum tertentu maupun kelompok tertentu bahkan di sinyalir menjadi kepentingan kepala Kampung,

disimpulkan dalam kategori pelanggaran tipe prinsip-prinsip partisipasi khususnya Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*) : Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. Artinya antara RT, RW Bamuskam dan pemegang kekuasaan harus seimbang dalam menyalurkan wewenang dan kekuasaan dilingkungannya sehingga tidak terjadi dominasi tunggal pengambil kebijakan dalam hal ini Bamuskam atau Pemerintah Kampung.

### **Upaya peningkatan partisipasi dalam pembangunan Kampung Kamangi**

Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat Kampung agar ikut serta dalam pembangunan (Marzali, 2003 dalam Sahidu, 1998) :

Learning Proses (*learning by doing*);

Learning Proses yaitu proses kegiatan dengan melakukan aktifitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dari hasil penelitian didapat bahwa proses pembelajaran memang harus dimulai dari sebuah kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan yang telah terjadi dimasa lalu dan sekarang, ini

merupakan awal proses belajar dari sebuah kekurangan. Mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat juga merupakan sebuah proses pembelajaran seperti yang di katakan kepala Kampung bahwa masyarakat ingin agar pembangunan rumah masuk dalam program kerja pemerintah Kampung, tentu ini juga merupakan suatu keinginan yang kuat dari masyarakat, entah kenapa masyarakat selalu ingin memasukan program pembangunan rumah setiap tahunnya tentunya dapat disimpulkan bahwa memang kebutuhan utama masyarakat Kamangi saat ini adalah perumahan layak huni. Kemudian keinginan pemerintah kampung khususnya kepala urusan perencanaan untuk segera mewujudkan program perumahan memang cukup kuat, bahkan beliau mengajak masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui Bamuskam tidak secara individu, prosedur penyampaian dikatakan masyarakat harus mengundang ketua Bamuskam untuk duduk bersama membahas apa keinginan masyarakat kedepan.

Dari kedua pernyataan informan tersebut jelas dikatakan sangat erat kaitannya dengan sebuah teori yang sudah di sampaikan oleh Marzali, 2003. Artinya teori ini sangat relevan dengan

pernyataan dari kedua tokoh Pemerintah Kampung Kamangi.

Institusional Development;

Institusional Development adalah melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karna institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.

Institusi merupakan wadah organisasi yang cukup kuat dalam sebuah kelompok. Kelompok tanpa sebuah institusi bagaikan keluarga tanpa rumah artinya setiap kelompok orang dan komunitas perlu sebuah institusi yang melindungi, mewadahi bahkan mengatur segala sesuatunya.

Pemerintah Kampung Kamangi telah memiliki beberapa institusi yang di akui keberadaannya, seperti keberadaan lembaga RT, RW, Bamuskam bahkan kelompok tani, dan kelompok peramu. Mengapa kelompok oranisasi kecil ini dikatakan sebuah institusi atau pranata sosial, karna institusi inilah yang paling dekat dengan masyarakat dan merupakan tangga pertama sebuah aspirasi bisa sampai ke pemerintahan pusat. Institusi RT, RW Bamuskam dan Gapoktan merupakan sarana dan bahan dalam mencetuskan sebuah pemikiran dari tingkat bawah, fungsi pranata sosial

ini memberikan ruang dan kekuatan dalam memberikan sebuah ide bahkan keinginan yang tulus dari seorang masyarakat ditingkat bawah.

Sehingga dalam proses diskusi kelompok para tokoh agama, adat, masyarakat bahkan pemerintah Kampung menekankan agar setiap informasi dan program dari pusat atau pemerintah Kampung agar di sampaikan melalui RT sehingga pemerintah Kampung tidak langsung menuju masyarakat tetapi melau RT. Ini merupakan cermin bahwa RT mempunyai kekuatan lembaga di tingkat bawah. Senada dengan ketua Bamuskam juga mengingatkan agar yang namanya RT agar membantu pemerintah dan kelompok tani yang ada di Kampung, contohnya RT harus mengajak masyarakat agar mendukung program pertanian Kampung hal ini disampaikan oleh ketua Bamuskam Kampung Kamangi bapa Robertus Kandemu saat beliau memberikan kesimpulan akhir tentang harapan dan keinginan masyarakat terhadap pembangunan Kampung kedepan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah-tengah diskusi kelompok. Pendapat serupa juga disampaikan oleh bapak RW 001 Andreas Dinggon bahwa fungsi pemerintah adalah mengatur semua

institusi yang ada di Kampung, bagaimana hubungan dan kerjasama antara RT dengan kepala Kampung, kepala Kampung dengan Bamuskam harus selalu di tingkatkan demi peningkatan partisipasi pembangunan Kampung kedepan yang lebih baik. Ketiga pernyataan ini tentunya mendapat dukungan secara teori dari Marzali 2003, bahwa pengembangan pranata yang sudah ada di masyarakat merupakan kekuatan sosial yang cukup tinggi, artinya dukungan bagi sebuah institusi pranata sosial merupakan syarat mutlak dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian disimpulkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Kamangi dilihat dari indikator prinsip-prinsip partisipasi masyarakat yaitu; cakupan, kesetaraan dan kemitraan, kesetaraan kewenangan, kesetaraan tanggung jawab, pemberdayaan, dan kerjasama mendapatkan hasil yang masih belum baik.

Hal ini ditandai dengan indicator cakupan masih belum terlaksana dengan baik. Yaitu penyusunan program pembangunan kampung hanya dibahas oleh beberapa oknum saja dan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kemudian masih minimnya ruang yang diberikan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat. Selain itu, mata pencaharian masyarakat setempat yang mengharuskan pergi ke ladang dan hutan membuat pemerintah kampung sulit memberdayakan mereka sehingga indikator pemberdayaan juga masih belum terlihat disana.

Kendala partisipasi yang ada di masyarakat kaitannya pembangunan Kampung Kamangi diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya terlibat dalam setiap pembangunan di kampung, sehingga mereka lebih memilih untuk mencari kebutuhan hidup mereka masuk ke hutan dari pada ikut dalam program-program pembangunan kampung. Kendala yang berikutnya adalah masih minimnya ruang yang diberikan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat yang akan ikut berpartisipasi.

Dengan melihat hasil penelitian di atas, maka yang dapat penulis sarankan adalah pemerintah kampung memberi ruang untuk melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan perencanaan kampung mulai tokoh-tokoh adat, tokoh agama, RT, RW Bamuskam dan aparatur kampung serta semua elemen masyarakat terutama



Soetomo. 2008. Strategi-Strategi  
Pembangunan Masyarakat.  
Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Quick, Kathryn S. Feldman, Martha S.  
2011. Distinguishing  
participation and inclusion.  
Journal of Planning Education  
and Research

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa

Slamet, M. 2003. Pembangunan  
Masyarakat Berwawasan  
Partisipasi. Surakarta : Sebelas  
Maret University Press

Sumampouw, Monique. (2004).  
"Perencanaan Darat-Laut yang  
Terintegrasi dengan  
Menggunakan Informasi Spasial  
yang Partisipatif." Jacob Rais, *et  
al. Menata Ruang Laut Terpadu.*  
Jakarta: Pradnya Paramita. 91-  
117.

Isbandi, R.A. 2007, perencanaan  
partisipatorisberbasis asset  
komunitas: dari pemikiran  
menuju penerapan. Depok: FISIP  
UI Press.